



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN SIKKA

LAPORAN KINERJA

**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Sikka Tahun 2022**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban formal pengguna anggaran sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.

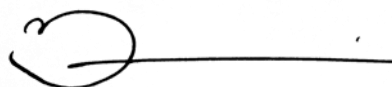
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini untuk memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan sesuai dokumen Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka, Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pada Tahun 2020 pemerintah Kabupaten Sikka melakukan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang diikuti dengan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, dan pada Tahun 2022 menindaklanjuti Hasil Evaluasi Atas SAKIP Kabupaten Sikka Tahun 2022 yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada Permasalahan dan Isu-isu Strategis, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapelitbang Kabupaten Sikka. Indikator Kinerja Utama disusun berorientasi hasil serta memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja perangkat daerah.

Demikian laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat semakin ditingkatkan sehingga semakin bermanfaat bagi perkembangan dan pembangunan daerah di Kabupaten Sikka.

Maumere, 30 Januari 2023
Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,



Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, S.T, M.Eng.

Pembina Tingkat I
NIP.19761206 200012 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Kabupaten Sikka yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka tahun 2018-2023 adalah **"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023"**. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui dua Misi Kabupaten Sikka, yaitu: (1) Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas; (2) Mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sikka ditetapkan 5 tujuan pembangunan dengan 9 indikator kinerja tujuan. Dalam mendukung perwujudan tujuan-tujuan tersebut, ditetapkan 10 sasaran pembangunan daerah dengan 20 indikator sasaran. Selanjutnya ditetapkan 8 strategi dan 29 arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan indikator tujuan **Persentase Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang**.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2022 terdiri dari 1 tujuan dan 2 sasaran strategi dan 6 indikator kinerja tujuan dan sasaran, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1 terdapat 2 sasaran strategi dan 6 indikator kinerja sasaran :
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (1) realisasi 85.58% atau **melampaui target 80%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (2) realisasi 100% atau **mencapai target 100%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (3) realisasi 100% atau **melampaui target 99.85%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (4) realisasi 100% atau **mencapai target 100%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (1), indikator kinerja (5) realisasi 58.13% atau **tidak mencapai target 94%**.
 - ✓ Capaian sasaran strategi (2), indikator kinerja (6) realisasi 100% atau **mencapai target 100%**.

Hasil analisis pencapaian kinerja Tahun 2022 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Penetapan Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Tahun 2022, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang selanjutnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan strategis dengan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.7.106.335.853,-** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar **Rp.7,000,117,171,-** dan Belanja Modal sebesar **Rp106.218.600,-**.

Pada akhir Tahun Anggaran 2022, total realisasi Belanja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah sebesar **Rp6.916.437.514,-** atau **97,33%** yang terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp6.810.218.914,-** atau **97,14%** dan realisasi Belanja Modal sebesar **Rp106.218.600,-** atau **100%**.

Dalam melaksanakan pencapaian tujuan maupun sasaran, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka terdapat hambatan/kendala antara lain (1) Jumlah pegawai yang masih kurang; (2) Masih rendahnya kualitas pelayanan; (3) Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM perencana; dan (4) Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI), (5) Dampak dari bencana covid19 masih terasa dan mempengaruhi kondisi fiskal daerah hal ini berakibat pula pada penyusunan perencanaan yang juga belum maksimal. Sebagai upaya untuk mengatasi hambatan/kendala tersebut Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah mengajukan usulan penambahan pegawai, penambahan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta mendorong aparatur Bapelitbang untuk mengikuti kegiatan Diklat dan Bimtek yang diselenggarakan secara daring oleh berbagai Lembaga Kementerian Pusat di tahun 2022 serta menggalang Kerjasama dengan berbagai Lembaga NGO dan swasta serta Kementerian. Melalui upaya tersebut diharapkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin meningkat.

Maumere, 30 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,



Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	1
1.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	1
1.2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	9
1.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana	11
1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	15
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	15
2.1.1. Visi	15
2.1.2. Misi	15
2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	16
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	19
2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	19
2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	23
3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	23
3.1.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5)	29
3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 Indikator (6)	33
3.1.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 (Indikator Penunjang)	36
3.1.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 (Indikator Penunjang)	37
3.1.5. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 (Indikator Penunjang)	38
3.2. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	41
3.2.1. Pendapatan	41

	3.2.2. Belanja Pegawai	41
	3.2.3. Belanja Barang dan Jasa	42
	3.2.4. Belanja Modal	43
Bab IV	Penutup	44
	4.1. Kesimpulan	44
	a. Capaian Indikator Kinerja	44
	b. Realisasi Anggaran	44
	4.2. Saran dan Rekomendasi	45
Lampiran	47
	1. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022	48
	2. Pengukuran Perubahan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022	49
	3. Perubahan Rencana Aksi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022	50
	4. Realisasi Perubahan Rencana Aksi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022	60
	5. Monev Rencana Aksi Atas Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 9
Tabel 1.2	Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 10
Tabel 1.3	Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 10
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai Menurut Golongan 11
Tabel 1.5	ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan 11
Tabel 1.6	Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 12
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 21
Tabel 2.4	Program/Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 23
Tabel 3.2	Perbandingan Pencapaian Kinerja pada sasaran Tahun 2020, 2021 dan capaian tahun 2022 24 Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Renstra :
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5) 30
Tabel 3.4	Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5) 31
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator (6) 34
Tabel 3.6	Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator (6) 34
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 1 (Indikator Penunjang) 36
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Sasaran 1 (Indikator Penunjang) 36
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 2 (Indikator Penunjang) 37
Tabel 3.10	Capaian Anggaran Sasaran 2 (Indikator Penunjang) 37
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran 3 (Indikator Penunjang) 38
Tabel 3.12	Capaian Anggaran Sasaran 3 (Indikator Penunjang) 39
Tabel 3.13	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka Tahun Anggaran 2022..... 41
Tabel 3.14	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka Tahun Anggaran 2022 42
Tabel 3.15	Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka Tahun Anggaran 2021 43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 8
Gambar 3.1	capaian realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Bapelitbang Tahun 2020 – 2022 26
Gambar 3.2	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD 26
Gambar 3.3	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD 26
Gambar 3.4	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan 27
Gambar 3.5	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Hasil Kelitbangan sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan 27
Gambar 3.6	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Partisipasi Anak dalam Proses Perencanaan 27
Gambar 3.7	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan 28
Gambar 3.8	capaian realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan 28
Gambar 3.9	capaian realisasi indikator kinerja Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian 28
Gambar 3.10	capaian realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka 29
Gambar 3.11	capaian realisasi indikator kinerja Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka ... 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah yang dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi.

Sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Untuk itu Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka akan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2021 dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang selanjutnya disebut Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2. Gambaran Umum Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

1.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan dan Litbang) Kabupaten Sikka merupakan unsur penunjang pemerintah daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan

maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 3. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perekonomian;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 3. Sub Bidang Keuangan dan Penanaman Modal.
- f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
 2. Sub Bidang Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman; dan
 3. Sub Bidang Kewilayahan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
- h. Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre, terdiri dari :
 1. Kepala UPT; dan
 2. Sub Bagian Tata Usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPT menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan rumah tangga, urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;
4. pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Perencanaan, Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
2. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
3. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
4. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
5. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
6. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
7. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

8. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
9. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
10. pengkajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
11. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
12. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
13. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
15. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan perencanaan di bidang pemerintahan, Pendidikan dan Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Keuangan dan Penanaman Modal. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten;
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum, Infrastruktur Perhubungan dan Permukiman, dan

Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah);
2. pengoordinasian penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. pengoordinasian Pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
5. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. pengoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi;
7. pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten.
8. pengoordinasian Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;
9. pengoordinasian Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;
10. pengoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
11. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
12. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
13. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; dan
14. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
15. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai tugas bidang; dan
16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

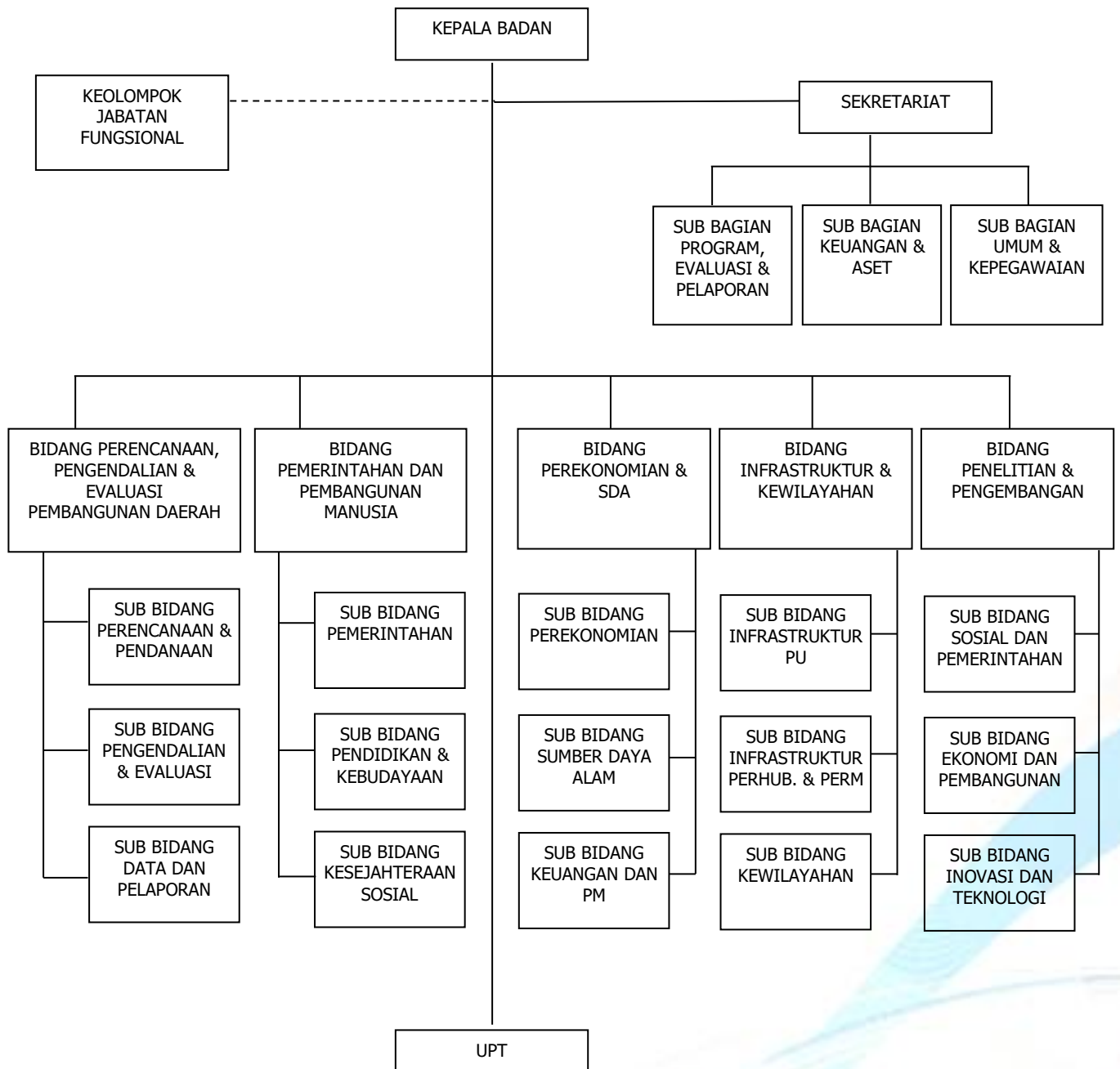
1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan Kabupaten;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan Kabupaten;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. UPT Sikka Inovation Centre dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang terdiri atas manajemen kekayaan intelektual, inkubasi dan alih teknologi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Sikka Inovation Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Kebutuhan Anggaran dan Perlengkapan guna disampaikan kepada Kepala Badan;
2. pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan kepada Kepala Badan;
3. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan percepatan keberhasilan pengembangan bisnis bagi masyarakat;
4. pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual yang meliputi perencanaan pengembangan dan perlindungan produk;
5. peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka



1.2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang yang dapat dirinci berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Status Kepegawaian Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	ASN	22	16	38
2.	Honor	15	4	19
	Jumlah	37	20	57

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 67% pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 32% adalah tenaga honor. Dari 19 tenaga honor tersebut terdapat 3 orang tenaga ahli yang menangani urusan sistem informasi dan teknologi dan 8 orang honorer yang ditempatkan untuk pelayanan administrasi pada kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dan 8 orang tenaga honor ditempatkan pada Unit Pelaksana Teknis Sikka Inovation Centre (SIC). Jika diperhatikan dari komposisi jenis kelamin, sebanyak 65% adalah laki-laki dan 34% adalah perempuan.

Dari gambaran data pegawai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, pada Desember 2022 terdapat 2 orang Aparatur Negeri Sipil yang memasuki masa purna bakti/pensiun sehingga sejak Januari 2023 jumlah pegawai Badan Perencanaan dan Litbang kabupaten Sikka menjadi berjumlah 37 orang.

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan agar dapat berkinerja secara optimal. Didasari bahwa peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan misinya maka, pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era globalisasi. Untuk tahun 2022 terdapat sejumlah 8 orang Aparatur Negeri Sipil telah mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Bappenas dan berbagai Lembaga pemerintah lainnya yang diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan tugas di bidang tugasnya masing-masing.

Klasifikasi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Tingkat Pendidikan ASN Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	SMA	5
2.	DIII	4
3.	DIV	1
4.	S1	22
5.	S2	6
	Jumlah	38

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas 15.79% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka adalah berpendidikan Strata Dua (S-2), diikuti 57.90% berpendidikan Strata Satu (S-1), 2.63% berpendidikan Diploma IV, 10.53% berpendidikan Diploma III, dan 13.15% berpendidikan SMA.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Jenjang Pangkat/Golongan ASN Badan Perencanaan dan Litbang
Kabupaten Sikka

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama/IV e	-
2.	Pembina Utama Madya/IV d	-
3.	Pembina Utama Muda/IV c	-
4.	Pembina Tingkat I/IV b	2
5.	Pembina/IV a	5
6.	Penata Tingkat I/III d	9
7.	Penata/III c	8
8.	Penata Muda Tingkat I/III b	3
9.	Penata Muda/III a	5
10.	Pengatur Tingkat I /II d	3
11.	Pengatur/II c	2
12.	Pengatur Muda Tingkat I/II b	1
13.	Pengatur Muda/II a	-
	Jumlah	38

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa 5% ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki Pangkat Pembina Tingkat I/IVb, diikuti 13% memiliki pangkat Pembina/IVa, 24% memiliki pangkat Penata Tingkat I/IIIId, 21% memiliki Pangkat Penata/IIIc, 8% memiliki Pangkat Penata Muda Tingkat I/IIIb, 13% memiliki Pangkat Penata Muda/IIIa, 8% ASN Pengatur Tingkat I/IIId selanjutnya terdapat 5% memiliki Pangkat Pengatur/IIc dan Pangkat Pengatur Muda Tingkat I/IIb terdapat 3%.

Jika digambarkan sebaran ASN pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menurut golongan, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	5	3	1	9
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	5	1	6
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	5	1	6
5	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	3	1	4
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	3	1	4
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	4	1	5
8	UPT Sikka Inovation Centre (SIC)	-	1	2	-	3
	Jumlah					38

Sumber: Hasil Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjejang sebagai berikut :

Tabel 1.5.
ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah ASN Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan	Jumlah ASN Yang Belum Mengikuti Diklat Kepemimpinan
1.	PIM II	-	1
2.	PIM III	2	6
3.	PIM IV	7	20
	Jumlah	9	27

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas sebanyak 2 orang ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka telah mengikuti Diklat PIM III dan 7 orang telah mengikuti Diklat PIM IV, sementara yang belum mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, Diklat PIM III 6 orang dan Diklat PIM IV sebanyak 20 orang.

1.2.3. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.
Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah
1	Ruang Kerja	12 Ruang
2	Ruang Rapat	2 Ruang
3	Ruang Produksi	2 Ruang
4	Mesin Produksi	28 Unit
5	Kendaraan Roda 4	2 Unit
6	Kendaraan Roda 2	16 Unit
7	Speedboat	1 Unit
8	Televisi	2 Unit
9	AC	30 Unit
10	Komputer PC	3 Unit
11	Printer	13 Unit
12	LCD Proyektor	8 Unit
13	Laptop	30 Unit
14	Plotter	1 Unit
15	GPS	5 Unit
16	Kamera	1 Unit
17	Handycam	1 Unit
18	Mesin Potong Rumput	1 Unit
19	Mesin Generator	1 Unit
20	Brankas	1 Unit
21	Microphone (Wireless Mic, floor stand, table stand)	10 unit
22	Soundsystem	1 paket
23	Lemari Es/freezer	5 unit
24	Telephone Mobile Intercome	11 unit
25	Wireless Behringer Europort MPA40BT-Pro All-In-One Portable	1 unit

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini memiliki 1 kompleks perkantoran dan 2 unit pengelola produksi. Ruang kerja Kantor Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi. Hasil kajian Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebesar 1,43. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang ada sesuai dengan jumlah dan jenis kualifikasi namun belum memadai.

1.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat

mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

1. Kekuatan :
Ada beberapa faktor pendukung yang dinilai sebagai kekuatan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
 - b. Adanya komitmen;
 - c. Adanya anggaran.
2. Kelemahan :
Ada beberapa faktor penghambat yang dinilai sebagai kelemahan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Jumlah pegawai yang masih kurang;
 - b. Masih
 - c. rendahnya kualitas pelayanan;
 - d. Masih rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM perencana;
 - e. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi (TI);
3. Tantangan :
Ada beberapa faktor penghambat yang dinilai sebagai tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan dari tingkat basis;
 - b. Ego sektor;
 - c. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi rencana;
 - d. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks.
4. Peluang :
Ada beberapa faktor pendukung yang diharapkan jadi peluang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tugas;
 - b. Adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
 - c. Semakin tingginya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan umum organisasi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama yang sedang dihadapi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Sub

bahasan mencakup Latar Belakang Penyusunan, Gambaran Umum, Permasalahan Utama serta Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Bab ini menjelaskan tentang Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang Capaian Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

2.1.1. Visi

Visi adalah pernyataan cita-cita atau impian akan sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang diinginkan adalah kondisi akhir periode yang harus dapat diukur pencapaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha pembangunan yang dilakukan pada umumnya bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat Kabupaten Sikka melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat menuju kehidupan yang bahagia.

Berdasarkan gambaran umum dan kondisi masyarakat Kabupaten Sikka serta mengacu pada RPJP Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 sebagai landasan idiil dan filosofis pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang dinamis dan berkesinambungan, maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Sikka yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2018-2023), adalah terwujudnya:

"TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023".

Formulasi visi di atas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar;
Pemenuhan hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan, Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
2. Bahagia
Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.

2.1.2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam upaya mewujudkan Visi. Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus mengacu pada masalah pokok daerah. Selain itu, Misi memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan.

Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah :

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat maka Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 dan RPJMD yang disusun mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaah terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, serta telaah terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yang kemudian telah disempurnakan Kembali melalui Keputusan Kepala Bapelitbang Kab. Sikka Nomor Bapelitbang.050/26/ VIII/Tahun 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Perubahan Substansi Pada Renstra Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 maka tujuan yang akan dicapai Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi.

Tujuan Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi dengan Indikator Persentase Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Untuk pencapaian tujuan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan Indikator Nilai SAKIP, Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas

(waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan), Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd, Indikator Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan.

2. Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang.

Sasaran Meningkatnya kualitas hasil kajian Kelitbang dengan Indikator Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan Kebijakan daerah.

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mewujudkan kualitas perencanaan yang baik dan terintegrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	68,46	72,71	76,96	80	84,22
			Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	92,00	100	100	100	100
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	97,30	98,80	99,80	99,85	100
			Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	93,18	95,18	97,68	99,68	100
			Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	88	90	92	94	96
		2. Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan koordinasi dan integrasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan adalah dengan merumuskan arah kebijakan, yaitu Peningkatan pengendalian, penyatuan dan upaya keterkaitan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan dan Peningkatan keterpaduan, sinkronisasi dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan Penyediaan data yang valid dan reliabel dan Optimalisasi pola perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dan kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melalui kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

2. Peningkatan ketaatan Perangkat Daerah terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan ketaatan PD terhadap jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi, pengendalian dan pelaporan adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas SDM perangkat daerah dan Optimalisasi SOP pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

3. Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan hasil kelitbangan sebagai dasar masukan perumusan kebijakan pembangunan daerah

adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kajian Penelitian yang dihasilkan Peningkatan SDM dan kerjasama pelaku Kelitbangan dan Pendidikan dan Pelaksanaan Pelatihan ASN yang bergerak di bidang Kelitbangan. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

4. Peningkatan profesionalitas ASN.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan profesionalitas ASN adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Keterampilan Dasar, Sosial dan Mental ASN. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

5. Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Perlengkapan/Peralatan perabot, interior dan tata ruang kantor. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

2.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2022.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang mana Indikator Utama Bapelitbang Kabupaten Sikka ini. Indikator Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sebagaimana terakhir telah dievaluasi oleh Kementerian PANRB serta dikukuhkan melalui Peraturan Bupati Sikka Nomor 50 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023 dan disempurnakan melalui Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan nomor Bapelitbang.050/25/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Nomor Bapelitbang.050/21/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2019-2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai SAKIP	68,46	68,46	72,71	76,96	80	84,22	84,22
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	92,00	92,00	100	100	100	100	100
3	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPd	97,30	97,30	98,80	99,80	99,85	100	100
4	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	93,18	93,18	95,18	97,68	99,68	100	100
5	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	88	88	90	92	94	96	96
6	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100	100	100	100	100	100	100

2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sikka kepada Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dari Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta dengan mencantumkan Indikator Kinerja dan Target Kinerja. Adapun indikator kinerja sasaran strategis yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	80
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	persen	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	persen	99,85
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	persen	99,68
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	94
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	persen	100

Tabel 2.4.

Program/Kegiatan dan Anggaran
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp4.374.530.056,-	APBD
	a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp15.231.700,-	APBD
	b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp3.256.583.594,-	APBD
	c) Administarasi Umum Perangkat Daerah	Rp250.461.300,-	APBD
	d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.97.313.600,-	APBD
	e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp620.397.362,-	APBD
	f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp134.542.500,-	APBD

2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.163.275.400,-	APBD
	a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp607.711.100,-	APBD
	b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp250.996.900,-	APBD
	c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp304.567.400,-	APBD
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp923.176.630,-	APBD
	a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp334.014.800,-	APBD
	b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp286.462.700,-	APBD
	c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp302.699.130,-	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan	Rp645.353.685,-	APBD
	a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp271.137.800,-	APBD
	b) Pengembangan Teknologi dan Inovasi	Rp374.215.885,-	APBD

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu satu tahun anggaran. Capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka 2022 dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dengan Bupati Sikka.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka tahun 2018-2023. Adapun sasaran, indikator dan capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 dapat diuraikan dalam Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	SATUAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	TARGET 2022	REALISASI 2022	PERSEN TASE %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP		Nilai	84.22 (A)	80 (A)	85.58	106,98
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang berkualitas}}{\text{Jml perangkat daerah}} \times 100$	persen	100	100	100	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	$\frac{\text{Jml Prog. RKPD Tahun berkenaan}}{\text{Jml. Prog. RPJMD yang harus dilaksanakan}} \times 100$	persen	100	99.85	100	100.15

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPMD Kedalam APBD	Jml Prog. RKPMD Tahun berkenaan	$\frac{\text{Jml. Prog. RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}}{\text{Jml. Prog. RKPMD Tahun berkenaan}} \times 100$	persen	100	100	100	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	Jml masyarakat yg hadir dlm Musrenbang	$\frac{\text{Jumlah peserta Musrenbang}}{\text{Jml masyarakat yg hadir dlm Musrenbang}} \times 100$	persen	100	94	58.13	61.84
2.	Meningkatnya kualitas dan efektifitas kegiatan Kelitbangan	Persentase Implementasi rencana kelitbangan	Jml hasil kajian Kelitbangan yg ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml hasil kajian Kelitbangan tahun berkenaan}}{\text{Jml hasil kajian Kelitbangan yg ditindaklanjuti}} \times 100$	persen	100	100	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari data tersebut diatas, Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan) sebesar 100% dari target Tahun 2022 sebesar 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPMD Tahun 2022 sebesar 100.15% dari target Tahun 2022 sebesar 99.85% sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 100%. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPMD Kedalam APBD Tahun 2022 sebesar 100% dari target Tahun 2022 sebesar 100% sedangkan target akhir periode Renstra sebesar 100%. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan sebesar 58.13% target Tahun 2022 sebesar 94% dan target akhir periode Renstra sebesar 96%. Persentase hasil kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan Tahun 2022 sebesar 100% dan target akhir periode Renstra sebesar 100%.

Gambaran perbandingan pencapaian target kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022 yang mengalami perubahan pada beberapa indikator kinerja dapat disajikan melalui tabel berikut :

Tabel 3.2.
Perbandingan pencapaian kinerja pada sasaran tahun 2020, 2021 dan 2022

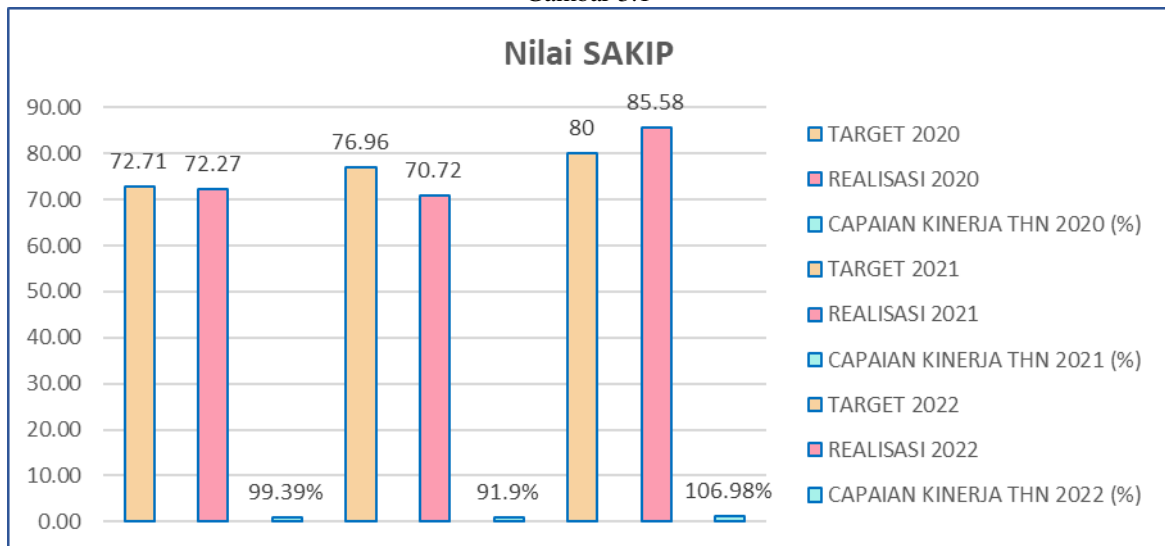
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		CAPAIAN KINERJA THN 2020 (%)	TAHUN 2021		CAPAIAN KINERJA THN 2021 (%)	TAHUN 2022		CAPAIAN KINERJA THN 2022 (%)	KET
			TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Persen	74	89.02	120.30	78	91.85	117.76	82	92.85	112.85	(Tidak menjadi Indikator Utama dipindahkan ke Eselon III)

2	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Indeks	0.28	0.33	117.86	0.37	0.41	110.76	0.47	0.51	108.51	(Tidak menjadi Indikator Utama dipindahkan ke Eselon III)
3	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Nilai	--	--	--	-	-	-	-	-	-	
4	Nilai Pengukuran Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Nilai	--	--	--	-	-	-	-	-	-	
5	Nilai Pelaporan Kinerja SAKIP Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Nilai	--	--	--	-	-	-	-	-	-	
	Nilai SAKIP	Nilai	72.71	72.27	99.39	76.96 (BB)	70.72 (BB)	91.90	80 (A)	85,58 (A)	106.98	
1	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Perencanaan	Persen	100	100	100	100	100	100	-	-	-	Tidak menjadi Indikator Utama di digabung ke Eselon III
2	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	Persen	-	-	-	-	-	-	100	100	100	
3	Persentase Konsistensi Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Persen	98.80	98.30	99.49	99.80	100	100	99.85	100	100.15	
4	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Persen	95.18	99.09	104.11	100	93.98	93.98	100	100	100	
5	Persentase Peran serta Masyarakat proses perencanaan	Persen	90.00	75.20	83.56	92	30	32.61	94	58.13	61.84	
6	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Partisipasi anak dalam proses perencanaan	Persen	17	17.65	96.33	22	4.29	19.48	-	-	-	
8	Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	Persen	82.00	76.24	92.97	85	89.60	105	-	-	-	Tidak menjadi Indikator Utama digabung ke Eselon III
9	Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Tidak menjadi Indikator Utama dipindahkan ke Eselon III

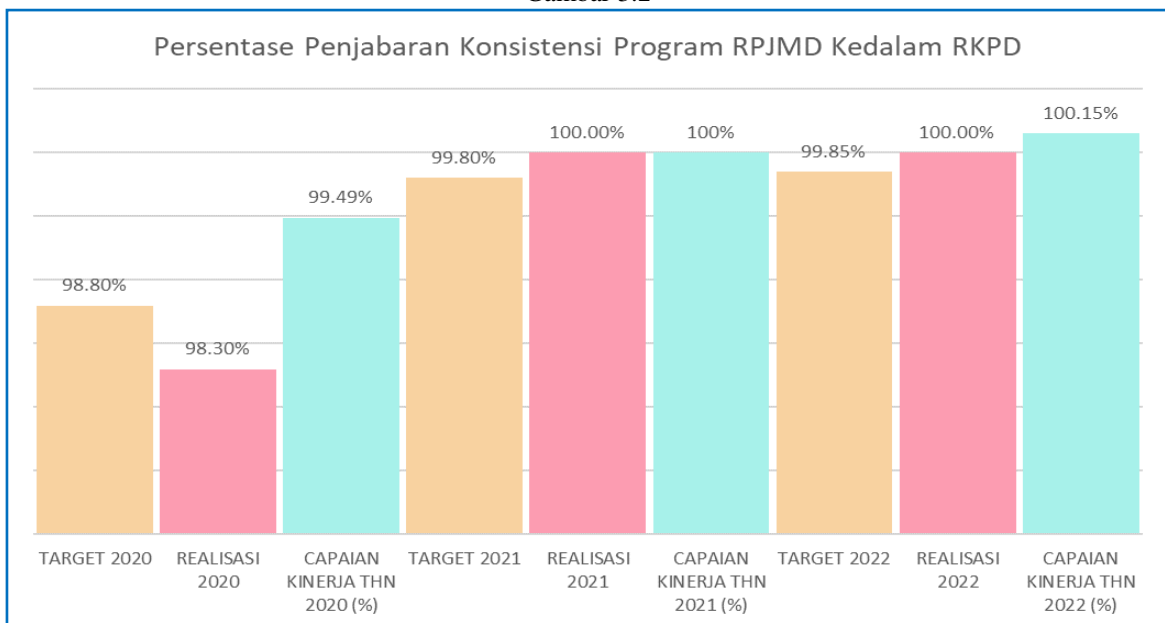
Sumber : Bapelitbang Kab.Sikka 2022

Gambaran capaian realisasi indikator kinerja Bapelitbang Tahun 2020 – 2022 jika disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

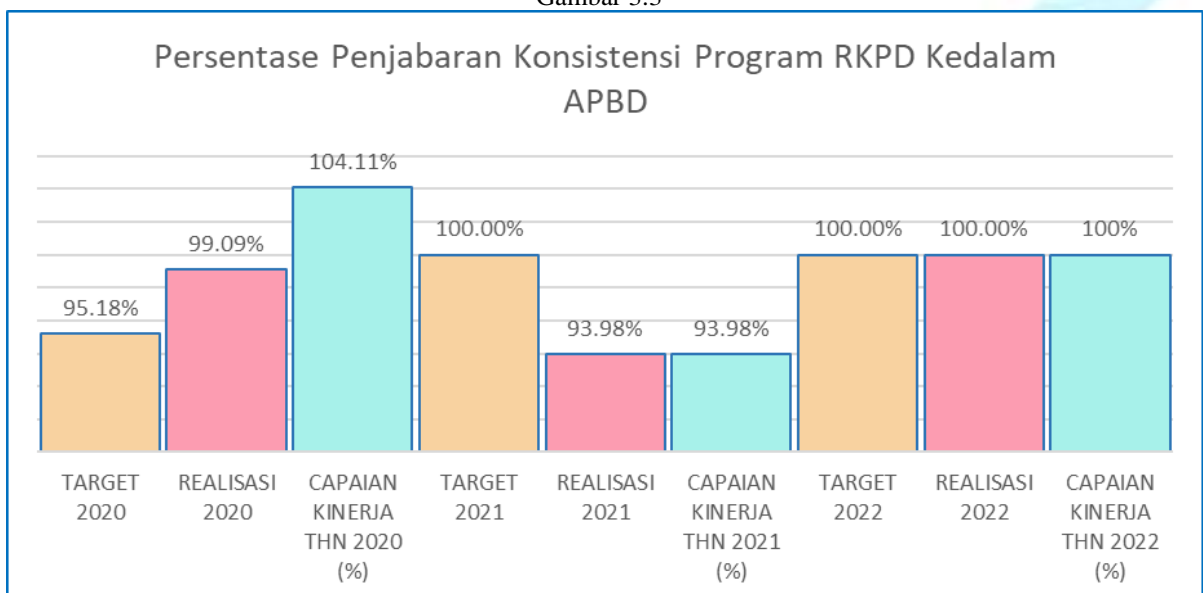
Gambar 3.1



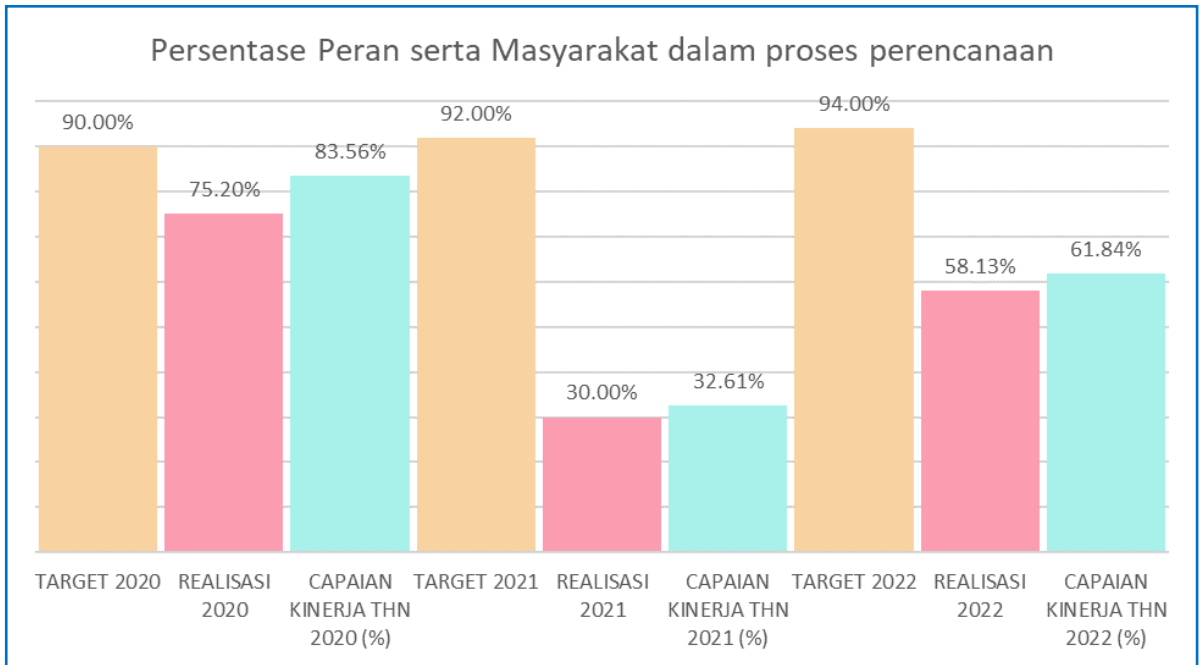
Gambar 3.2



Gambar 3.3



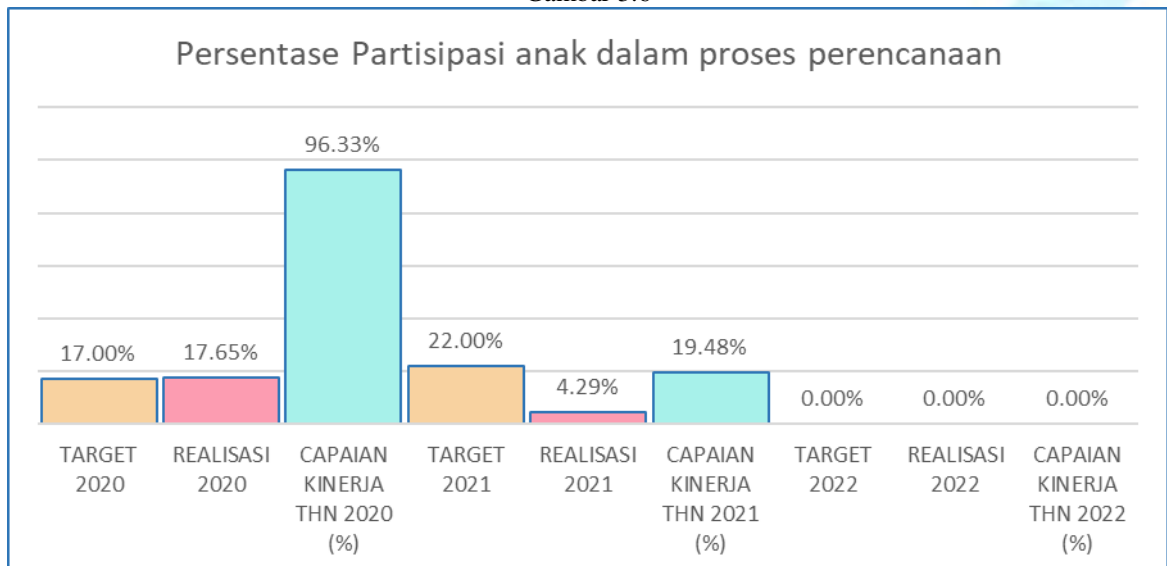
Gambar 3.4



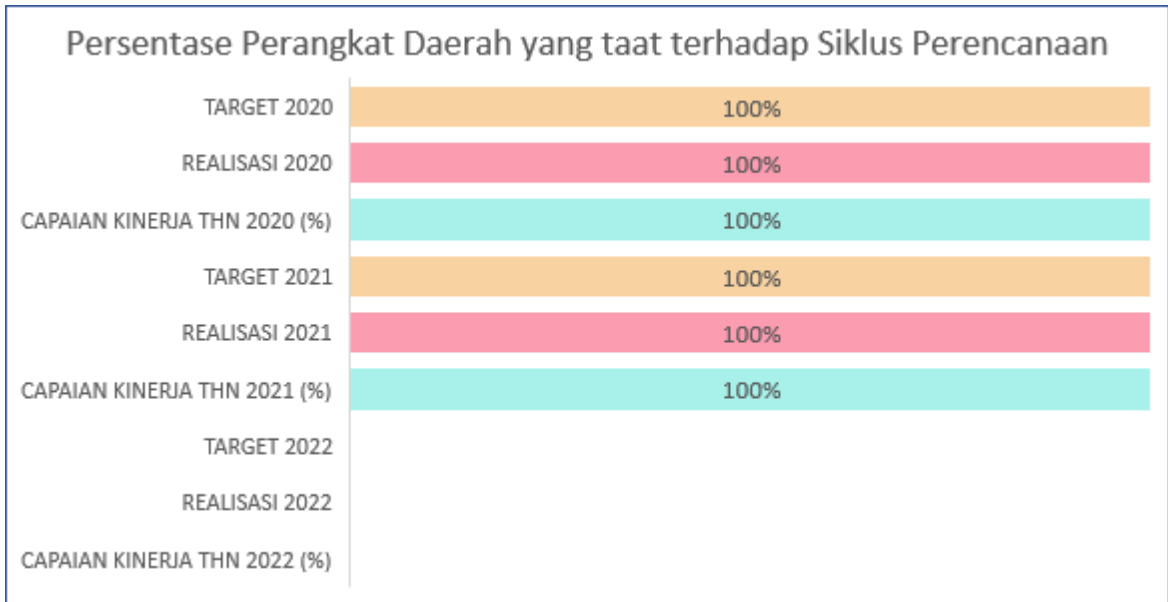
Gambar 3.5



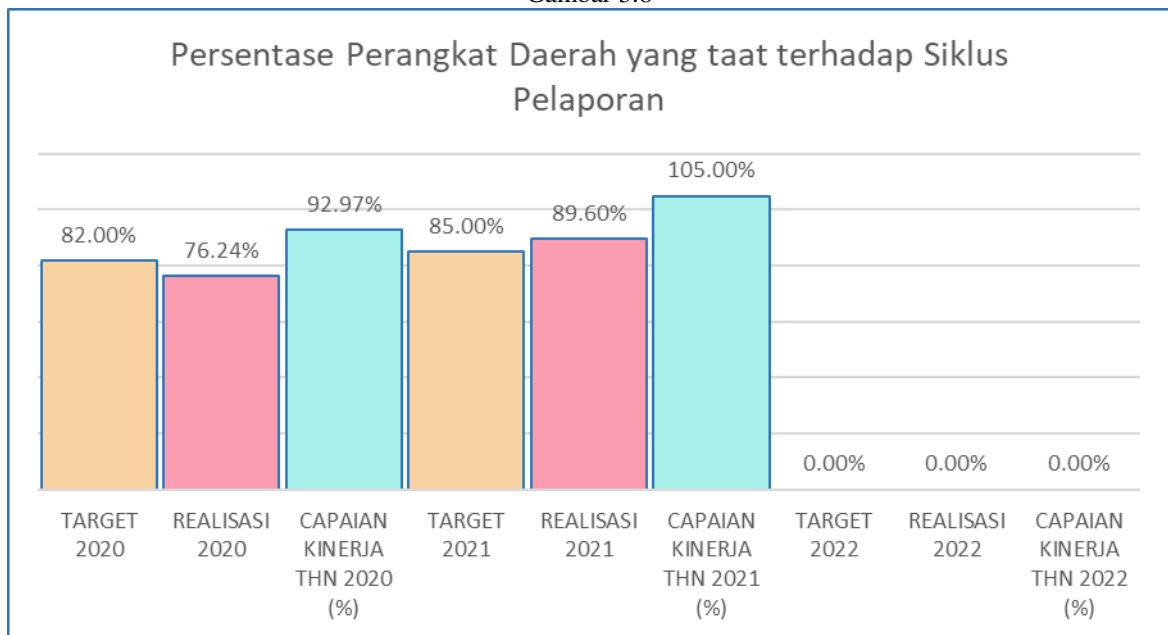
Gambar 3.6



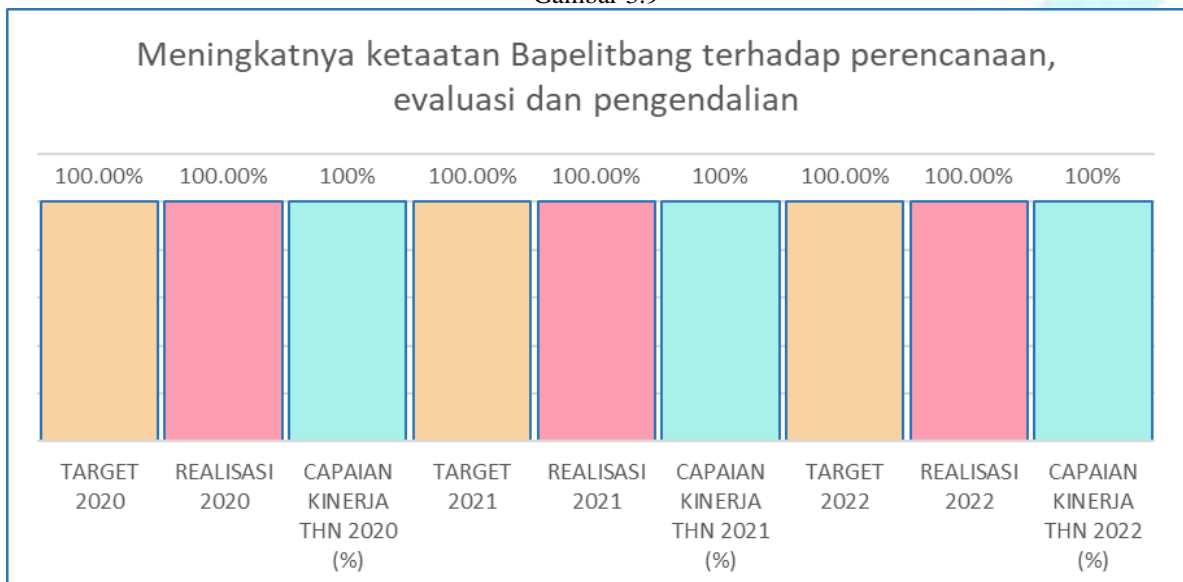
Gambar 3.7



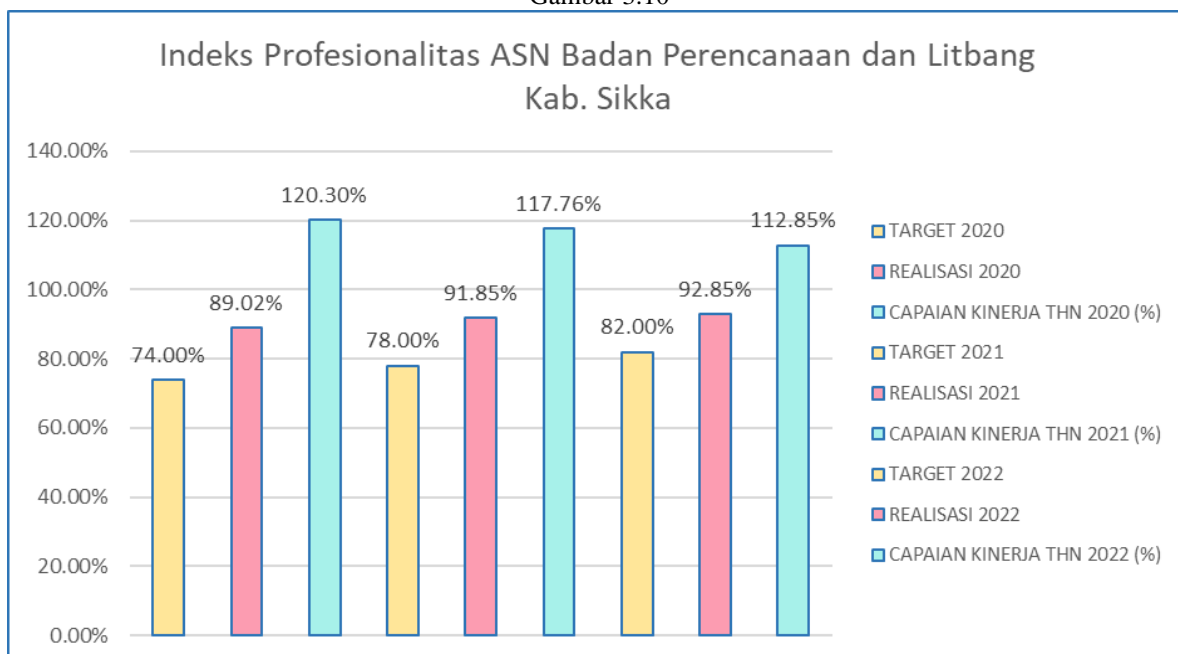
Gambar 3.8



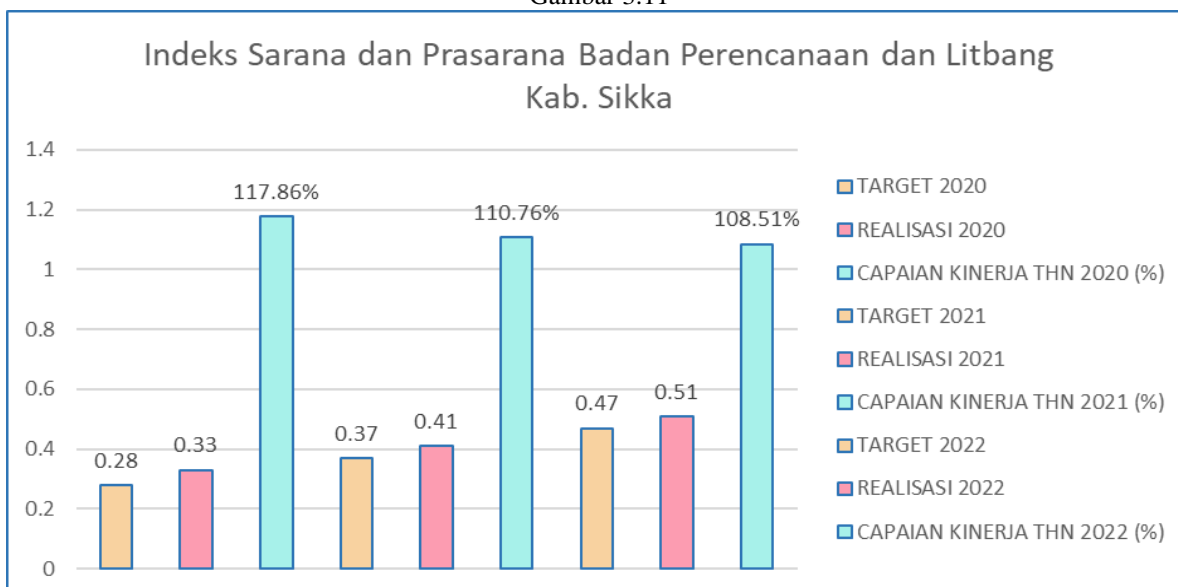
Gambar 3.9



Gambar 3.10



Gambar 3.11



Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program/kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing- masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 berdasarkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

3.1.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), dan (5)

Sasaran 1 : Meningkatnya perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Indikator (1) : Nilai SAKIP

Indikator (2) : Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas

(waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)

Indikator (3) : Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD

Indikator (4) : Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD

Indikator (5) : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan

Tabel 3.3.

Capaian Kinerja Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4) dan (5)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Meningkatnya koordinasi dan tata kelola perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien	Nilai SAKIP	80	85.58	106.98
	Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	100	100	100
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	99.85	100	100.15
	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100	100	100
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan	94	58.13	61.84

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja dari Nilai SAKIP Bapelitbang Kab. Sikka pada Tahun 2022 adalah sebesar 106.98%, Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan) pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD pada Tahun 2022 adalah sebesar 100.15%, capaian Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD pada tahun 2022 sebesar 100%, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan pada Tahun 2022 adalah sebesar 61.84, dari gambaran diatas menunjukkan peningkatan pada capaian nilai SAKIP Bapelitbang Kab. Sikka di Tahun 2022 sementara pada indikator persentase partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan di Tahun 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 namun masih belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022; hal ini akan lebih ditingkatkan lagi di tahun 2023 melalui upaya koordinasi yang intens ditingkat pemerintah dan kelompok/Lembaga masyarakat.

Pencapaian sasaran ini ditempuh melalui pengalokasian anggaran dan realisasi pelaksanaan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Anggaran Sasaran 1 Indikator (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP				
	2. Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)				
	3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD				
	4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD				
	5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan				
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp1.163.275.400,-	Rp.1.160.249.186,-	99.74
		Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp607.711.100,-	Rp.607.122.160,-	99.90
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp250.996.900,-	Rp.249.915.610,-	99,57
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp304.567.400,-	Rp.303.211.416,-	99.55
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp923.176.630,-	Rp.911.783.974,-	98.77
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.334.014.800,-	Rp.328.159.898,-	98.25	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.286.462.700,-	Rp.283.354.660,-	98.92	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.302.699.130,-	Rp.300.269.416,-	99.20	
			Rp2.086.452.030,-	Rp.2.072.033.160,-	99.25

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 99.25% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 53.76% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi

gaji dan tunjangan lainnya. Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Capaian program tersebut antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang didukung oleh 4 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, untuk kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara untuk kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Dukungan Capaian program tersebut antara lain melalui pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), yang didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang didukung oleh 6 sub kegiatan yaitu : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi antara lain disebabkan karena :

1. Masih terasanya dampak bencana covid 19 yang berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas;
2. Lemahnya kondisi fiskal daerah sebagai akibat masih belum optimalnya pencapaian target penerimaan daerah;
3. Adanya persepsi masyarakat atas penyelenggaraan Musrenbang sebagai kegiatan rutinitas;
4. Usulan masyarakat yang belum direalisasi;
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap jaminan realisasi rencana;
6. Meningkatnya kebutuhan masyarakat yang sangat beragam dan kompleks;
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pengendalian yang belum optimal;
8. Data perencanaan yang belum komprehensif baik dari validitas maupun realibilitas;

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Perlu sosialisasi dan diseminasi secara berkala dan berjenjang berbagai jenis perencanaan;
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk usulan masyarakat;
3. Menggali peluang potensi penerimaan daerah dan ketaatan masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi;
4. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rutin;
5. Menentukan prioritas pembangunan berdasarkan isu strategis yang telah ditetapkan;
6. Peningkatan dan pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
7. perbaiki sistem data dan informasi perencanaan pembangunan;

3.1.2. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 Indikator (6)

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan

Indikator (3) : Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Sasaran 2 Indikator (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah	100	100	100%

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Hasil Kelitbangan Dalam Penyusunan Kebijakan Daerah pada Tahun 2022 mencapai 100%.

Sedangkan alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Capaian Anggaran Sasaran 2 Indikator (6)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Capaian 2022
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.645.353.685,-	Rp.639.561.516,-	99.10

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 99.10% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 16.63% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya. Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dengan kegiatannya adalah :

- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Kegiatan ini di dukung dengan 3 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi, sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Penyusunan dan Penginputan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Penelitian Dan Penyusunan Kajian Indeks Kebahagiaan, Indeks Kepuasan Masyarakat Dan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2022 selain itu

juga dilakukan Koordinasi Pencairan Dana, Progres Penyerapan Dan Dan Realisasi Fisik Kegiatan Yang Bersumber Dari Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Kabupaten Sikka Tahun 2021, Sub Kegiatan Fasilitas dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan, sub kegiatan ini dilaksanakan untuk pelaksanaan koordinasi dan pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Sikka.

- Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Kegiatan ini didukung dengan sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi berupa pelaksanaan operasional produksi Cokelat Sikka (chosik), sub kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif, sub kegiatan ini dilaksanakan untuk Fasilitas dan Pendampingan Kegiatan Inovasi Pada Perangkat Daerah Tahun 2022 dan sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dilaksanakan untuk Sosialisasi dan Diseminasi Kakao Fermentasi kepada kelompok-kelompok petani Kakao di 7 kecamatan (Nita, Bola, Hewokloang, Waigete, Pada, Mego dan Lela) dalam diseminasi tersebut yang juga melibatkan Dinas Pertanian dan Caritas Keuskupan juga dilakukan pelatihan pengolahan kakao fermentasi agar petani bisa menghasilkan kakao yang berkualitas.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan antara lain disebabkan karena :

1. Masih rendahnya kesediaan berbagi data oleh perangkat daerah dan Lembaga selaku produsen data untuk kebutuhan perencanaan
2. Masih rendahnya kualitas data yang dihasilkan setiap sektor
3. Masih rendahnya pengetahuan dan penciptaan inovasi daerah
4. Pelaksanaan produksi chosik masih belum maksimal akibat mesin produksi pengolah cokelat hanya sebanyak 1 unit sehingga beban operasional menjadi tinggi dan berakibat rusak.
5. Pelaksanaan pembelian komoditi untuk bahan produksi dan alat-alat bantu produksi masih belum tertib jadwal

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Meningkatkan kerjasama dan komitmen bersama dalam wadah Forum Satu Data
2. Mendorong perangkat daerah dan berbagai Lembaga untuk menghasilkan inovasi daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah/kepala perangkat daerah/Lembaga terkait.
3. Mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan mesin produksi serta tertib jadwal pemeliharaan.
4. Pelaksanaan kegiatan mempedomani kalender kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator Pendukung Capaian Kinerja Bapelitbang Kabupaten Sikka

3.1.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 (Indikator Penunjang)

Sasaran : Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap pelaporan, evaluasi dan pengendalian

Indikator : Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Sasaran 1 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap pelaporan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	100	100	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian pada Tahun 2022 sebesar 100%.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Capaian Anggaran Sasaran 1 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Capaian 2022
Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap pelaporan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp15.231.700,-	Rp15.091.850,-	99.08
			Rp15.231.700,-	Rp15.091.850,-	99.08

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 99.08% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 0.39% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 99.08%.

Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

3.1.4. Pengukuran Pencapaian Sasaran 2 (Indikator Penunjang)

Sasaran : Meningkatnya Profesionalitas ASN

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja Sasaran 2 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	82	92.85	112.85

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka pada Tahun 2022 sebesar 112.85.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Capaian Anggaran Sasaran 2 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Capaian 2022
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp3.507.044.894,-	Rp3.345.006.932,-	95.38
			Rp3.507.044.894,-	Rp3.345.006.932,-	95.38

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel diatas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 95.38% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 49.35% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 95.38%.
Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, serta Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD.
- Kegiatan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, serta Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Penentuan Rencana Anggaran Kas tidak sesuai dengan time schedule pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan;
2. Pelaksanaan SOP terkait administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan kurang maksimal.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Penentuan Rencana Anggaran Kas merujuk pada time schedule/kalender kerja yang telah disusun.
2. Manajemen waktu atau manajemen prioritas;
3. Optimalisasi Penerapan SOP

3.1.5. Pengukuran Pencapaian Sasaran 3 (Indikator Penunjang)

Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Indikator : Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja Sasaran 3 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	0.47	0.51	108.51

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka pada Tahun 2022 sebesar 108.51.

Alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran ini melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Capaian Anggaran Sasaran 3 (Indikator Penunjang)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran 2022	Realisasi Anggaran 2022	Capaian 2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp852.253.462,-	Rp844.684.056,-	99.11
			Rp852.253.462,-	Rp844.684.056,-	99.11

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

Dari tabel di atas didapatkan bahwa capaian anggaran yang mendukung pencapaian sasaran ini yaitu sebesar 99.11% dengan persentase anggaran yang mendukung sasaran ini sebesar 21.96% dari total anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi gaji dan tunjangan lainnya.

Pencapaian indikator kinerja program dan kinerja anggaran diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai berikut :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai dalam program ini sebesar 64.88%. Capaian program tersebut dicapai antara lain melalui pelaksanaan kegiatan :

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan ini dicapai melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik antara lain disebabkan karena :

1. Pelaksanaan program dan kegiatan belum sesuai kalender kerja;
2. Pengendalian internal yang kurang memadai.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut di atas maka upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1. Manajemen waktu atau manajemen prioritas;
2. Sistem pengendalian internal.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

- Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Manusia :

Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien adalah ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan memiliki kualitas yang baik serta profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kaitan antara manajemen sumberdaya manusia dengan peningkatan kinerja sangat berhubungan erat sehingga menjadi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dengan beberapa upaya yang dapat dilakukan :

Pertama, Kegiatan pelatihan-pelatihan dan diklat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan dan penganggarannya sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada tahun-tahun yang akan datang.

Kedua, Melakukan pengawasan melekat internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pegawai pada unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Ketiga, Memberikan reward dan punishment kepada pegawai sesuai kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

- Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana :

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka ditunjang dengan sejumlah sarana dan prasarana kerja. Kondisi yang ada sarana prasarana kantor penunjang pelaksanaan kegiatan kantor seperti laptop dan printer dari sisi jumlah dan ketersediaan pegawai belum memadai.

Selain itu kondisi bangunan kantor UPT. SIC yang masih belum memadai dan rusak berakibat pada kurangnya rasa nyaman akan perlindungan terhadap mesin-mesin produksi serta bahan material komoditi produksi demikian pula dengan kondisi pagar kantor Bapelitbang Kab. Sikka yang roboh berakibat warga sekitar menggunakan sebagai jalan pintas arus keluar masuk serta halaman kantor dimanfaatkan sebagai tempat ikat hewan; hal ini juga menimbulkan rasa kurang nyaman akan perlindungan terhadap fasilitas kantor.

Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

- Untuk tahun 2022, Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka melaksanakan 4 program, 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik.

- Untuk tahun-tahun yang akan datang perlu diberi perhatian khusus terkait perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan, dan tertib dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan sehingga pencapaian kinerja dapat meningkat dan presentase realisasi anggaran juga dapat terserap dengan baik. Dari 4 program dan 14 kegiatan dan 46 sub kegiatan pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka semuanya sangat menunjang keberhasilan kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

3.2. Realisasi Anggaran Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

2.2.1. Pendapatan

Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka mengelola Pendapatan Daerah dari hasil penjualan Cho-Sik yang dikelola oleh UPT Sikka Inovation Centre. Tahun 2021 target pendapatan sebesar Rp250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.240.251.000,- atau sebesar 96.10%.

2.2.2. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Tahun 2022 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Pegawai sebesar **Rp3.256.583.594,-** dengan realisasi sebesar **Rp3.095.264.448,-** atau 95.05% yang secara rinci dapat dilihat Tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.13.

Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA PEGAWAI	3,256,583,594	3,095,264,448	95.05
1.	Gaji Pokok/Uang Representasi	1,868,750,183.00	1,816,881,200	97.22
2.	Tunjangan Keluarga	171,907,576.00	162,419,204	94.48
3.	Tunjangan Jabatan	265,090,000.00	260,380,000	98.22
4.	Tunjangan Fungsional	28,588,043.00	25,605,000	89.57
5.	Tunjangan Beras	104,083,473.00	101,170,740	97.20
6.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7,169,260.00	1,740,405	24.28
7.	Pembulatan Gaji	41,615.00	24,853	59.72
8.	Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS	766,953,444.00	686,168,046	89.47
9.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.500.000	9,375,000	75.00

10.	Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	26.700.000	26.700.000	100
11.	Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.800.000	4.800.000	100

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

2.2.3. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp3,743,533,577,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp3,714,954,466,-** atau 99.24% yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.14.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA BARANG DAN JASA	3,743,533,577,-	3,714,954,466,-	99.24
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,020,632,862,-	1,012,264,790,-	99.18
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,231,700,-	15,091,850,-	99.08
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,461,300,-	249,802,484,-	99.74
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620,397,362,-	618,465,242,-	99.69
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134,542,500,-	128,905,214,-	95.81
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,163,275,400,-	1,160,249,186,-	99.74
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	19,768,400,-	19,723,000,-	99.77
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	250,996,900,-	249,915,610,-	99.57
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	304,567,400,-	303,211,416,-	99.55
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	923,176,630,-	911,783,974,-	98.77
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	334,014,800,-	328,159,898,-	98.25
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	286,462,700,-	283,354,660,-	98.92
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	302,699,130,-	300,269,416,-	99.20

4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	636,448,685,-	630,656,516,-	99.06
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	271,137,800,-	267,352,850,-	98.60
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	365,310,885,-	363,303,666,-	99.45

Sumber : Olahan Bapelitbang Kabupaten Sikka, 2022

2.2.4. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2021 Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka menganggarkan Belanja Modal sebesar **Rp106,218,600,-** namun dari rencana yang telah dibuat belanja Modal tersebut tidak dapat direalisasikan sebagai akibat dari adanya kebijakan larangan pencairan anggaran khusus Belanja Modal. Tabel Belanja Modal dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.15.
Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022
Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022

NO.	URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,313,600,-	97,313,600,-	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,313,600,-	97,313,600,-	100
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.905.000	8.905.000	100
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	8.905.000	8.905.000	100

Sumber : Bapelitbang Kab. Sikka, 2022

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil capaian kinerja yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya seluruh capaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka pada Tahun 2022 dapat tercapai secara baik.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 berisikan informasi-informasi pengelolaan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka.

Secara umum kesimpulan dari pencapaian indikator kinerja pada Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 dapat dilihat pada Nilai SAKIP realisasi capaiannya 85.58 (A), Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan) capaiannya 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD capaiannya 100%, Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD 100%, Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan capaiannya 58.13%, Persentase Hasil Kelitbangan Sebagai Masukan Penyusunan Kebijakan capaiannya 100%, sementara untuk indicator pendukung yakni Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap Perencanaan, evaluasi dan pengendalian capaiannya 100%, Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka capaiannya 92.85%, Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka capaiannya 0.51%. Pencapaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka beberapa sudah cukup optimal, dan perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan sedangkan untuk beberapa indikator kinerja yang belum tercapai perlu menjadi perhatian dan lebih ditingkatkan.

b. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2022 alokasi anggaran Belanja Operasi yang digunakan untuk pencapaian sasaran khususnya Belanja Barang dan Jasa serta Belanja

Modal adalah sebesar Rp3,849,752,177,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp3,821,173,066,- atau sebesar 99.26%. Dari persandingan antara persentase realisasi anggaran dengan persentase pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa secara umum penggunaan anggaran di Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 sangat baik.

Sebagai penutup Laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya

4.2. Saran dan Rekomendasi

Evaluasi atas capaian hasil penyelenggaraan pemerintahan khususnya Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka, merupakan komitmen moral terhadap perbaikan kinerja yang dicapai. Hal ini menjadi landasan proporsional dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Sikka ke depan. Untuk itu marilah bersama-sama satukan kekuatan, rajut kebersamaan dan ciptakan kerjasama yang profesional.

Selanjutnya, pada prinsipnya permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka dapat dicarikan solusinya dengan baik. Namun demikian, langkah-langkah korektif dan antisipatif tetap dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah/hambatan yang timbul sebagai wujud dalam meningkatkan kinerja yang lebih baik kedepannya. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai secara efektif, efisien dan akuntabel.

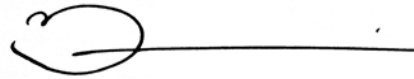
Untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah, melalui (1) peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perencana; (2) peningkatan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan; dan (3) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat.

3. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intens, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

Maumere, 30 Januari 2022

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Sikka,



Margaretha Movaldes DM Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

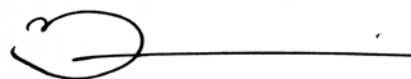
LAMPIRAN-LAMPIRAN

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai	80
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	Persen	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	persen	99.85
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	persen	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	94
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	persen	100

Maumere, 19 Desember 2022

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Sikka,



Margaretha M. D. M. Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP. 19761206 200012 2 003

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	HASIL PENGUKURAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP	nilai	80	85.56	106,98
		Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	persen	100	100	100
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	persen	99.85	100	100.15
		Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPd Kedalam APBD	persen	100	100	100
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	persen	94	58.13	61.89
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan Daerah	persen	100	100	100

Jumlah Anggaran 2022


Rp.7.106.335.771,-

Jumlah Realisasi Anggaran 2022

Rp.6.916.437.514,-

Maumere, 13 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sikka,



Margaretha Movaldes D.M Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

**PERUBAHAN RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	SATUAN	TARGET	ANGGARAN / TRIWULAN				JUMLAH ANGGARAN
							I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1. Nilai SAKIP	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persen	100	103,192,500	413,172,355	94,668,900	552,241,645	1,163,275,400
		2. Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	Persen	100	79,583,600	266,264,680	53,275,400	208,632,420	607,711,100
		3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	OPD	60	7,337,000	11,690,000	-	741,400	19,768,400
		4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten	Orang	450	1,865,600	134,340,400	45,400	2,415,700	138,667,100
		5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang Dihasilkan	Dokumen	21	64,143,000	10,625,000	-	77,100	74,845,100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	2	6,193,000	109,609,280	53,230,000	205,398,220	374,430,500
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	4	8,863,900	12,822,975	5,277,600	224,032,425	250,996,900
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	8,863,900	822,975	4,544,100	201,863,325	216,094,300
				Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Diamankan	Dokumen	1					
				Jumlah Data dan Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen	1					
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Disusun	Dokumen	1	--	12,000,000	733,500	22,169,100	34,902,600
2.	Meningkatnya ketaatan Perangkat Daerah terhadap Siklus Pelaporan	7. Persentase Perangkat Daerah yang taat terhadap Siklus Pelaporan	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	6	14,790,000	134,084,700	36,115,900	119,576,800	304,567,400
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang Dihasilkan	Dokumen	1	-	56,818,500	7,072,000	82,955,100	146,845,600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan	Dokumen	2	14,790,000	77,266,200	29,043,900	36,621,700	157,721,800
				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah dihasilkan	Dokumen	1					
				Jumlah Dokumen SPM, Evaluasi RPJMD	Dokumen	2					
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	34,084,700	164,001,940	195,335,520	529,754,470	923,176,630
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	7,053,500	55,716,680	86,408,220	184,836,400	334,014,800
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	36	6,178,000	16,387,450	16,678,550	46,582,500	85,826,500
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	Dokumen	36	-	3,100,000	1,086,700	17,762,700	21,949,400
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi	Dokumen	36	-	327,500	5,094,600	21,448,600	26,870,700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	Dokumen	62	765,000	20,901,730	34,220,270	51,437,600	107,324,600
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	Dokumen	62	110,500	11,350,000	6,357,600	18,590,200	36,408,300
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	62	-	3,650,000	22,970,500	29,014,800	55,635,300
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100	16,441,200	38,381,900	49,400,000	182,239,600	286,462,700
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Dokumen	14	15,325,000	12,963,300	16,503,650	13,389,250	58,181,200
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	Dokumen	14	266,200	6,860,000	8,295,400	53,832,200	69,253,800
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	Dokumen	14	-	8,143,600	6,838,750	43,272,550	58,254,900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	OPD	4	675,000	2,915,000	9,062,200	19,966,500	32,618,700
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi	OPD	4	175,000	3,000,000	4,200,000	14,653,100	22,028,100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi	OPD	4	-	4,500,000	4,500,000	37,126,000	46,126,000
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	10,590,000	69,903,360	59,527,300	162,678,470	302,699,130
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	Dokumen	20	2,610,000	1,814,400	2,025,000	54,833,000	61,282,400
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	Dokumen	20	930,000	22,541,800	6,080,000	4,612,300	34,164,100
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	20	7,050,000	25,925,000	6,925,000	21,498,600	61,398,600

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	Dokumen	136	-	19,622,160	18,882,300	40,476,340	78,980,800
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	Dokumen	136	-	-	9,240,000	15,978,530	25,218,530
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	Dokumen	136	-	-	16,375,000	25,279,700	41,654,700
2.	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan	Persentase Hasil Kelitbangan dalam Penyusunan Kebijakan daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan untuk perumusan perencanaan	Persen	100	59,281,170	134,557,800	113,327,964	338,186,751	645,353,685
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbangan yang direkomendasikan	Persen	100	1,805,000	19,065,400	13,605,050	236,662,350	271,137,800
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	-	-	-	41,600,800	41,600,800
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelitbangan	Dokumen	2	1,805,000	19,065,400	13,605,050	141,664,250	176,139,700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	1	-	-	-	53,397,300	53,397,300
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Persen	100	57,476,170	115,492,400	99,722,914	101,524,401	374,215,885
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kegiatan	1	56,353,220	96,028,800	78,143,414	80,303,351	310,828,785
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	-	-	-	19,981,000	19,981,000
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan	Kegiatan	2	1,122,950	19,463,600	21,579,500	1,240,050	43,406,100
3.	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	1,192,957,715	1,142,922,329	1,180,583,042	1,177,561,948	4,694,025,034
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	2,400,000	2,605,000	2,565,650	7,661,050	15,231,700
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	4	2,400,000	2,605,000	2,565,650	7,661,050	15,231,700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	750,082,355	784,399,303	912,252,807	809,849,129	3,256,583,594
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	Orang	38	742,882,355	777,199,303	905,052,807	799,949,129	3,225,083,594
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi (kuitansi, SPP, SPM, Pengajuan Permintaan Anggaran dan SPJ)	Dokumen	48	7,200,00	7,200,000	7,200,000	9,900,000	31,500,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	5,684,401	29,790,809	81,602,176	133,383,914	250,461,300
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi/Penerangan Kantor yang Tersedia	Jenis	15	--	--	--	6,395,400	6,395,400
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	Jenis	59	2,099,200	7,247,100	9,559,735	11,768,365	30,674,400
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	OM	1800	--	--	5,725,000	5,860,000	11,585,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Kantor yang tersedia dan Digandakan	Jenis	15	3,285,201	3,285,201	12,213,949	11,215,649	30,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	kali	40	300,000	19,258,508	54,103,492	98,144,500	171,806,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	97,313,600	-	-	-	97,913,600
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang tersedia	Unit/Paket	8	97,313,600	-	-	-	97,913,600
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Persen	100	130,671,139	141,851,067	168,666,383	179,208,773	620,397,362
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi (internet, astinet, telepon), Sumber Daya Air & Listrik yg tersedia	bulan	12	40,605,063	51,683,943	46,507,063	56,623,433	195,419,502
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang tersedia Jumlah Honor dan Iuran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar Jumlah Jasa Pengelola Keuangan yang tersedia	Jenis Org org	19 1 9	90,066,076	90,167,124	122,159,320	122,585,340	424,977,860
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	35,910,018	17,980,837	20,270,314	60,381,331	134,542,500
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	unit	22	10,943,718	17,392,877	20,270,314	33,536,991	82,143,900

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	unit	22	--	587,960	--	10,112,040	10,700,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Paket	2	24,966,300	--	--	16,732,300	41,698,600
				Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	unit	31					

**REALISASI PERUBAHAN RENCANA AKSI
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN		RENCANA AKSI / TRIWULAN				REALISASI ANGGARAN / TRIWULAN				TOTAL REALISASI	PERSEN	OPD PENANGGUNGJAWAB
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG	6,181,450,574	7,106,335,771	1,121,346,283	1,688,359,111	1,588,689,714	2,707,980,663	803,476,345	1,701,311,299	1,043,792,878	3,366,256,992	6,914,837,514	97.31	BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	936,333,500	1,163,275,400	103,232,500	413,172,355	94,668,900	552,241,645	84,683,500	302,667,260	170,599,640	600,698,786	1,158,649,186	99.60	
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	491,709,000	607,711,100	79,578,600	266,264,680	53,275,400	208,632,420	59,945,000	208,188,060	89,170,540	248,218,560	605,522,160	99.64	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	23,688,400	19,768,400	7,377,000	11,690,000	-	741,400	-	19,022,000	701,000	0	19,723,000	99.77	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	200,666,100	138,667,100	1,865,600	134,340,400	45,400	2,415,700	-	101,763,860	10,064,560	26,095,600	137,924,020	99.46	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	92,101,000	74,845,100	64,143,000	10,625,000	-	77,100	54,820,000	18,097,900	-	1,825,300	74,743,200	99.86	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	175,253,500	374,430,500	6,193,000	109,609,280	53,230,000	205,398,220	5,125,000	69,304,300	78,404,980	220,297,660	373,131,940	99.65	
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	101,914,000	250,996,900	8,863,900	12,822,975	5,277,600	224,032,425	8,425,000	11,800,000	3,714,200	225,976,410	249,915,610	99.57	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	57,494,300	216,094,300	8,863,900	822,975	4,544,100	201,863,325	8,425,000	-	2,980,700	203,943,810	215,349,510	99.66	
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	44,419,700	34,902,600	-	12,000,000	733,500	22,169,100	-	11,800,000	733,500	22,032,600	34,566,100	99.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	342,710,500	304,567,400	14,790,000	134,084,700	36,115,900	119,576,800	16,313,500	82,679,200	77,714,900	126,503,816	303,211,416	99.55	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	185,288,700	146,845,600	-	56,818,500	7,072,000	82,955,100	2,023,500	7,410,000	52,544,100	84,577,526	146,555,126	99.80	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	157,421,800	157,721,800	14,790,000	77,266,200	29,043,900	36,621,700	14,290,000	75,269,200	25,170,800	41,926,290	156,656,290	99.32	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	885,136,230	923,176,630	34,084,700	164,001,940	195,335,520	529,754,470	32,408,000	94,504,950	128,169,790	656,701,234	911,783,974	98.77	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	326,857,600	334,014,800	7,053,500	55,716,680	86,408,220	184,836,400	6,943,000	26,042,230	24,639,950	270,534,718	328,159,898	98.25	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	63,520,400	85,826,500	6,178,000	16,387,450	16,678,550	46,582,500	6,178,000	6,650,000	11,087,450	61,706,240	85,621,690	99.76	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	21,949,400	21,949,400	-	3,100,000	1,086,700	17,762,700	-	880,000	850,000	18,037,318	19,767,318	90.06	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	26,870,800	26,870,700	-	327,500	5,094,600	21,448,600	-	-	327,500	26,129,820	26,457,320	98.46	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	102,642,100	107,324,600	765,000	20,901,730	34,220,270	51,437,600	765,000	14,751,730	2,250,000	88,830,200	106,596,930	99.32	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46,549,600	36,408,300	110,500	11,350,000	6,357,600	18,590,200	-	110,500	9,000,000	25,066,780	34,177,280	93.87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	65,325,300	55,635,300	-	3,650,000	22,970,500	29,014,800	-	3,650,000	1,125,000	50,764,360	55,539,360	99.83	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	269,571,100	286,462,700	16,441,200	38,381,900	49,400,000	182,239,600	10,475,000	27,658,000	38,431,400	206,790,260	283,354,660	98.92	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	58,181,200	58,181,200	15,325,000	12,963,300	16,503,650	13,389,250	9,625,000	15,899,400	8,525,200	23,820,920	57,870,520	99.47	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69,253,800	69,253,800	266,200	6,860,000	8,295,400	53,832,200	-	3,400,000	3,876,200	61,761,330	69,037,530	99.69	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	58,254,900	58,254,900	-	8,143,600	6,838,750	43,272,550	-	8,143,600	-	49,621,240	57,764,840	99.16	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	28,327,100	32,618,700	675,000	2,915,000	9,062,200	19,966,500	675,000	215,000	6,430,000	24,655,890	31,975,890	98.03	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	26,028,100	22,028,100	175,000	3,000,000	4,200,000	14,653,100	175,000	-	9,700,000	11,546,900	21,421,900	97.25	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	29,526,000	46,126,000	-	4,500,000	4,500,000	37,126,000	-	-	9,900,000	35,383,980	45,283,980	98.17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	288,707,530	302,699,130	10,590,000	69,903,360	59,527,300	162,678,470	14,990,000	40,804,720	65,098,440	179,376,256	300,269,416	99.20	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	61,282,400	61,282,400	2,610,000	1,814,400	2,025,000	54,833,000	1,970,000	1,000,000	1,825,000	55,993,500	60,788,500	99.19	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	34,164,200	34,164,100	930,000	22,541,800	6,080,000	4,612,300	5,970,000	16,481,800	-	11,563,940	34,015,740	99.57	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	61,398,600	61,398,600	7,050,000	25,925,000	6,925,000	21,498,600	7,050,000	-	26,325,000	27,559,200	60,934,200	99.24	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	58,827,100	78,980,800	-	19,622,160	18,882,300	40,476,340	-	23,322,920	12,923,440	42,356,676	78,603,036	99.52	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	25,218,530	25,218,530	-	-	9,240,000	15,978,530	-	-	-	24,671,040	24,671,040	97.83	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	47,816,700	41,654,700	-	-	16,375,000	25,279,700	-	-	24,025,000	17,231,900	41,256,900	99.05	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,820,294,194	4,374,530,056	924,747,913	976,627,016	1,185,357,330	1,287,797,797	644,460,647	1,144,469,217	631,480,466	1,784,432,508	4,204,842,838	96.12	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000	15,231,700	2,400,000	2,605,000	2,565,650	7,661,050	-	4,910,000	110,650	10,071,200	15,091,850	99.08	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,000,000	15,231,700	2,400,000	2,605,000	2,565,650	7,661,050	-	4,910,000	110,650	10,071,200	15,091,850	99.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,016,780,308	3,256,583,594	750,082,355	784,399,303	912,252,807	809,849,129	498,340,723	933,993,951	474,420,793	1,188,508,981	3,095,264,448	95.05	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,987,980,308	3,225,083,594	742,882,355	777,199,303	905,052,807	799,949,129	498,340,723	919,593,951	474,420,793	1,171,408,981	3,063,764,448	95.00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28,800,000	31,500,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	9,900,000	-	14,400,000	-	17,100,000	31,500,000	100.00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	121,400,000	250,461,300	5,684,401	29,790,809	81,602,176	133,383,914	4,489,500	28,730,608	51,833,400	164,748,976	249,802,484	99.74	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	6,395,400	-	-	-	6,395,400	-	-	-	6,395,000	6,395,000	99.99	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,000,000	30,674,400	2,099,200	7,247,100	9,559,735	11,768,365	899,200	7,699,100	7,749,350	14,084,200	30,431,850	99.21	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	11,585,000	-	-	5,725,000	5,860,000	-	-	-	11,567,500	11,567,500	99.85	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	30,000,000	3,285,201	3,285,201	12,213,949	11,215,649	3,290,300	3,173,000	8,174,100	15,292,200	29,929,600	99.77	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61,400,000	171,806,500	300,000	19,258,508	54,103,492	98,144,500	300,000	17,858,508	35,909,950	117,410,076	171,478,534	99.81	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	97,313,600	-	-	-	97,313,600	-	-	-	97,313,600	97,313,600	100.00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	97,313,600	-	-	-	97,313,600	-	-	-	97,313,600	97,313,600	100.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	570,977,786	620,397,362	130,671,139	141,851,067	168,666,383	179,208,773	107,635,906	157,094,309	87,522,233	266,212,794	618,465,242	99.69	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201,919,926	195,419,502	40,605,063	51,683,943	46,507,063	56,623,433	23,401,826	63,121,939	20,923,153	87,028,634	194,475,552	99.52	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369,057,860	424,977,860	90,066,076	90,167,124	122,159,320	122,585,340	84,234,080	93,972,370	66,599,080	179,184,160	423,989,690	99.77	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,136,100	134,542,500	35,910,018	17,980,837	20,270,314	60,381,331	33,994,518	19,740,349	17,593,390	57,576,957	128,905,214	95.81	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63,436,800	82,143,900	10,943,718	17,392,877	20,270,314	33,536,991	9,028,218	19,740,349	17,005,430	35,192,207	80,966,204	98.57	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10,700,000	10,700,000	-	587,960	-	10,112,040	-	-	587,960	6,193,750	6,781,710	63.38	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,999,300	41,698,600	24,966,300	-	-	16,732,300	24,966,300	-	-	16,191,000	41,157,300	98.70	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	539,686,650	645,353,685	59,281,170	134,557,800	113,327,964	338,186,751	41,924,198	159,669,872	113,542,982	324,424,464	639,561,516	99.10	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	150,965,700	271,137,800	1,805,000	19,065,400	13,605,050	236,662,350	5,630,000	12,461,400	23,304,750	225,956,700	267,352,850	98.60	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	41,600,800	-	-	-	41,600,800	-	-	-	41,571,630	41,571,630	99.93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	150,965,700	176,139,700	1,805,000	19,065,400	13,605,050	141,664,250	5,630,000	12,461,400	23,304,750	132,672,210	174,068,360	98.82	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	53,397,300	-	-	-	53,397,300	-	-	-	51,712,860	51,712,860	96.85	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	388,720,950	374,215,885	57,476,170	115,492,400	99,722,914	101,524,401	36,294,198	147,208,472	90,238,232	98,467,764	372,208,666	99.46	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	300,828,650	310,828,785	56,353,220	96,028,800	78,143,414	80,303,351	36,294,198	126,106,122	75,935,632	70,712,854	309,048,806	99.43	
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	-	19,981,000	-	-	-	19,981,000	-	-	-	19,896,310	19,896,310	99.58	
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	44,906,100	43,406,100	1,122,950	19,463,600	21,579,500	1,240,050	-	21,102,350	14,302,600	7,858,600	43,263,550	99.67	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	42,986,200	-					-	-			-		

Maumere, 13 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,

Margaretha Movaldes D.M Bapa,ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

MONEV RENCANA AKSI ATAS PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA TRIWULAN				PROGRAM/KEGIATAN TAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	TARGET	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN / TRIWULAN				PENANGGUNGJAWAB	REALISASI JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN			
			1	2	3	4					I	II	III	IV		1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<i>Meningkatnya akuntabilitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja birokrasi</i>	1. Nilai SAKIP	80 (A)					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100%	1,163,275,400	84,683,500	302,667,260	170,599,640	600,698,786					
	2. Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian Perangkat Daerah yang berkualitas (waktu, kesesuaian dengan tema dan target pembangunan)	100					Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase capaian pelaksanaan Penyusunan Perencanaan & Pendanaan	100%	607,711,100	59,945,000	208,188,060	89,170,540	248,218,560	Bidang PPEPD - Bapelitbang Kab. Sikka				
	3. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD	99.85		60			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Peserta Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah	60 OPD	19,768,400	-	19,022,000	701,000	0					
	4. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Kedalam APBD	100		45			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Musrenbang Kabupaten	450 Org	138,667,100	-	101,763,860	10,064,560	26,095,600					
	5. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam proses perencanaan	94		21			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Dokumen Musrenbang Kecamatan yang Dihasilkan	21 Dok	74,845,100	54,820,000	18,097,900	-	1,825,300					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				1 D o k			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen Perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	2 Dok	374,430,500	5,125,000	69,304,300	78,404,980	220,297,660					
							Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dok	250,996,900	8,425,000	11,800,000	3,714,200	225,976,410	Bidang PPEPD - Bapelitbang Kab. Sikka				
							Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dok	216,094,300	8,425,000	-	2,980,700	203,943,810					
								Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Diamankan	1 Dok										
								Jumlah Data dan Informasi untuk Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Dok										
							Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Daerah yang Disusun	1 Dok	34,902,600	-	11,800,000	733,500	22,032,600					
							Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dok/Lap	304,567,400	16,313,500	82,679,200	77,714,900	126,503,816	Bidang PPEPD - Bapelitbang Kab. Sikka				
							Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan DAK, TP yang Dihasilkan	1 Dok	146,845,600	2,023,500	7,410,000	52,544,100	84,577,526					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				1 D ok			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD yang dihasilkan	2 Dok	157,721,800	14,290,000	75,269,200	25,170,800	41,926,290					
				1 D ok				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Pembangunan Daerah dihasilkan	1 Dok										
								Jumlah Dokumen SPM, Evaluasi RPJMD	2 Dok										
							PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	923,176,630	32,408,000	94,504,950	128,169,790	656,701,234					
							Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	334,014,800	6,943,000	26,042,230	24,639,950	270,534,718	Bidang PPM - Bapelitbang Kab. Sikka				
				18 D ok			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang dihasilkan	36 Dok	85,826,500	6,178,000	6,650,000	11,087,450	61,706,240					
				18 D ok			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang diasistensi	36 Dok	21,949,400	-	880,000	850,000	18,037,318					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			18 D ok	18 D ok			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid. Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang di monitoring dan evaluasi	36 Dok	26,870,700	-	-	327,500	26,129,820					
				30 D ok			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dihasilkan	62 Dok	107,324,600	765,000	14,751,730	2,250,000	88,830,200					
				30 D ok			Asistensi Penyusunan Dok. Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid. Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang diasistensi	62 Dok	36,408,300	-	110,500	9,000,000	25,066,780					
			28 D ok	8 D ok			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid. Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dimonitoring dan evaluasi	62 Dok	55,635,300	-	3,650,000	1,125,000	50,764,360					
							Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	286,462,700	10,475,000	27,658,000	38,431,400	206,790,260	Bidang PSDA - Bapelitbang Kab. Sikka				
				7			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	14 Dok	58,181,200	9,625,000	15,899,400	8,525,200	23,820,920					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				7			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang diasistensi	14 Dok	69,253,800	-	3,400,000	3,876,200	61,761,330					
			7	7			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian yang dimonitoring dan evaluasi	14 Dok	58,254,900	-	8,143,600	-	49,621,240					
				2			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dihasilkan	4 OPD	32,618,700	675,000	215,000	6,430,000	24,655,890					
				2			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang diasistensi	4 OPD	22,028,100	175,000	-	9,700,000	11,546,900					
			2	2			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang dimonitoring dan evaluasi	4 OPD	46,126,000	-	-	9,900,000	35,383,980					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	302,699,130	14,990,000	40,804,720	65,098,440	179,376,256	Bidang IW - Bapelitbang Kab. Sikka				
				10			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dihasilkan	20 Dok	61,282,400	1,970,000	1,000,000	1,825,000	55,993,500					
				10			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di asistensi	20 Dok	34,164,100	5,970,000	16,481,800	-	11,563,940					
			5	5			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang di Monitoring dan Evaluasi	20 Dok	61,398,600	7,050,000	-	26,325,000	27,559,200					
				68			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dihasilkan	136 Dok	78,980,800	-	23,322,920	12,923,440	42,356,676					
				68			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di asistensi	136 Dok	25,218,530	-	-	-	24,671,040					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			34	34			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang di Monitoring dan Evaluasi	136 Dok	41,654,700	-	-	24,025,000	17,231,900					
Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbang	Persentase Hasil Kelitbang dalam Penyusunan Kebijakan daerah	100					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbang yang digunakan untuk perumusan perencanaan	100%	645,353,685	41,924,198	159,669,872	113,542,982	324,424,464					
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase Kelitbang yang direkomendasikan	100%	271,137,800	5,630,000	12,461,400	23,304,750	225,956,700	Bidang Litbang - Bapelitbang Kab. Sikka				
							Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Lap	41,600,800	-	-	-	41,571,630					
			-	-			Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Dokumen, Data dan Informasi Kelitbang	2 Dok	176,139,700	5,630,000	12,461,400	23,304,750	132,672,210					
							Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Lap	53,397,300	-	-	-	51,712,860					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	100%	374,215,885	36,294,198	147,208,472	90,238,232	98,467,764	Bidang Litbang - Bapelitbang Kab. Sikka				
			0.12	0.25			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Keg	310,828,785	36,294,198	126,106,122	75,935,632	70,712,854					
							Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	1 Lap	19,981,000	-	-	-	19,896,310					
			-	-			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Diseminasi Hasil Kelitbangan	2 Keg	43,406,100	-	21,102,350	14,302,600	7,858,600					
			-	-			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual yang Difasilitasi	-- Keg	-	-	-	-	-					
Meningkatnya ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian	Persentase ketaatan Bapelitbang terhadap perencanaan, evaluasi dan pengendalian						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	4,374,530,056	644,460,647	1,144,469,217	631,480,466	1,784,432,508					
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dok	15,231,700	-	4,910,000	110,650	10,071,200	Bagian Program - Bapelitbang Kab. Sikka				
			3	2			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dok	15,231,700	-	4,910,000	110,650	10,071,200					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	3,256,583,594	498,340,723	933,993,951	474,420,793	1,188,508,981	Bagian Keuangan - Bapelitbang Kab. Sikka					
		37	37				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Bapelitbang Kab. Sikka yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	38 Org	3,225,083,594	498,340,723	919,593,951	474,420,793	1,171,408,981						
		25	52				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang diverifikasi (kuitansi, SPP, SPM, Pengajuan Permintaan Anggaran dan SPJ)	48 Dok	31,500,000	-	14,400,000	-	17,100,000						
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	250,461,300	4,489,500	28,730,608	51,833,400	164,748,976	Sekretariat - Bapelitbang Kab. Sikka					
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	15 Jenis	6,395,400	-	-	-	6,395,000						
		12	24				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	59 Jenis	30,674,400	899,200	7,699,100	7,749,350	14,084,200						
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang tersedia	1800 OM	11,585,000	-	-	-	11,567,500						
		6	5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Kantor yang tersedia dan Digandakan	15 Jenis	30,000,000	3,290,300	3,173,000	8,174,100	15,292,200						
		2	2				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan keluar daerah yang dilaksanakan	40 Kali	171,806,500	300,000	17,858,508	35,909,950	117,410,076						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Indeks Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka	0.37					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	100%	97,313,600.00	-	-	-	97,313,600						
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	8 Unit/Paket	97,313,600	-	-	-	97,313,600						
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	620,397,362	107,635,906	157,094,309	87,522,233	266,212,794	Sekretariat Bapelitbang Kab. Sikka					
			3	2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi (internet, astinet, telepon), Sumber Daya Air & Listrik yg tersedia	12 Bulan	195,419,502	23,401,826	63,121,939	20,923,153	87,028,634						
			18	18			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan yang tersedia Jumlah Honor dan luran Jaminan Kesehatan, Kecelakaan dan Kematian yang terbayar Jumlah Honorarium tenaga Ahli IT yang tersedia Jumlah Upah Kerja yang terbayar	19 Jenis	424,977,860	84,234,080	93,972,370	66,599,080	179,184,160						
		16	16	16 Org																
		3	3			3 Org														
		2	2			2 Org														
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur yang menunjang kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	134,542,500	33,994,518	19,740,349	17,593,390	57,576,957	Sekretariat - Bapelitbang Kab. Sikka					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			19	2			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	22 Unit	82,143,900	9,028,218	19,740,349	17,005,430	35,192,207					
			-	-			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	22 Unit	10,700,000	-	-	587,960	6,193,750					
			1	-			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	2 Paket	41,698,600	24,966,300	-	-	16,191,000					

Maumere, 13 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan dan Litbang Kab. Sikka,

Margaretha Movaldes D.M Bapa, ST, M.Eng.

Pembina Tingkat I

NIP.19761206 200012 2 003

